

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat. *Ethos* berarti karakter yang meneliti terkait konsep baik atau buruk, salah atau benar yang dikaitkan dengan tindakan. Kata *sitte* dari Bahasa Jerman menunjukkan makna moda (*mode*) yang berarti tingkah laku, suatu konstansi, keberlanjutan atau tindakan manusia, sedangkan dalam Bahasa Arab etika disebut sebagai *akhlaq* yang berarti jatidiri, budi, atau citra. Akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang membentuk kebiasaan melekat pada diri seseorang sehingga dapat disebut dengan suatu kejadian atau *nature* orang tersebut. Secara etimologis, etika adalah ilmu tentang apa yang baik atau buruk, hak atau kewajiban moral; tentang kumpulan asas yang berkaitan dengan akhlak; serta nilai mengenai penilaian dari suatu masyarakat atau golongan.³⁰

Salah satu pemikir yang merumuskan konsep etika bisnis Islam adalah Syed Nawab Haider Naqvi, seorang ekonom terkemuka asal Pakistan yang lahir di Meerut, British India pada tahun 1935. Beliau mengembangkan pendekatan sistematis dalam kajian ekonomi Islam dan menegaskan bahwa etika harus menempati peran sentral dalam disiplin tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangannya bahwa diperlukan analisis

³⁰ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, Cetakan I (Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021), 14-17.

yang lebih mendalam mengenai apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Islam serta kontribusi yang dapat diberikannya untuk membebaskan manusia dari kekurangan, kemiskinan, dan kemerosotan moral. Etika memberi arah bagi perilaku ekonomi melalui seperangkat norma yang bersumber dari ajaran moral Islam. Penulis menggunakan teori ini karena nilai-nilai etika memiliki posisi penting dalam ekonomi Islam, khususnya pada praktik bisnis.³¹

Syed Nawab Haider Naqvi berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang membahas mengenai perilaku atau tindakan ekonomi beberapa umat Islam dalam masyarakat Muslim modern.³² Sedangkan etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan suatu bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dalam bisnis karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang bernilai baik dan benar. Etika atau akhlak mempunyai posisi yang sangat penting bagi kehidupan suatu manusia, baik sebagai individu dalam masyarakat ataupun anggota bangsawan. Sebab Islam sebagai the *holistic way of life*, selain memiliki ajaran yang bersifat transendental, juga memberikan perhatian terhadap aspek humanis atau kemanusiaan.³³

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Syed Nawab Haider Naqvi membagi sistem etika Islam ke dalam empat prinsip utama, yakni prinsip kesatuan atau tauhid (*unity*), prinsip keseimbangan (*equilibrium*), prinsip kehendak bebas (*free will*), serta

³¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis* (Leicester, Inggris: 1986), 18-20.

³² Ambok Pangiuk, *Etika Bisnis Islam Kontemporer*, Cetakan I (Malang: CV Maknawi, 2022), 2.

³³ *Ibid.*, 210-211.

prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Penjelasan lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Prinsip Kesatuan atau Tauhid (*Unity*)

Etika Islam bersumber pada keyakinan akan keesaan Allah SWT. Kehidupan yang selaras dapat dicapai dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, agama, dan politik. Manusia menyadari bahwa Allah adalah Zat Maha Kuasa, Maha Memiliki, serta Maha Mengetahui, sementara manusia hanyalah pemegang amanah di bumi. Konsep tauhid tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menjadi landasan persatuan antar sesama manusia. Seluruh aktivitas hidup, termasuk ibadah, pekerjaan, dan interaksi sosial, ditujukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Yusuf ayat 40 dan Surah Al-An'am ayat 162.

Seluruh unsur kehidupan dalam pandangan Islam baik dari segi ekonomi, sosial, politik, agama, maupun hubungan manusia dengan alam, saling berkaitan dalam satu kesatuan yang utuh. Prinsip ini mendorong manusia untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga persaudaraan tanpa membedakan suku maupun bangsa, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. Keyakinan kepada Allah juga memberikan petunjuk dan kepastian hidup karena Allah adalah sumber kebenaran yang membimbing manusia menuju jalan yang benar, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Yunus ayat 35 dan Surah Al-A'raf ayat 178. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tauhid menjadi dasar terciptanya kehidupan yang teratur, harmonis, dan berorientasi pada

kebaikan bersama.³⁴

b. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip ini menekankan gabungan antara nilai *ihسان* (kebaikan) dan *adl* (keadilan). Nilai keseimbangan tercermin dalam pemerataan pendapatan, penyesuaian produksi, distribusi, dan konsumsi, serta kewajiban membantu fakir miskin. Prinsip ini dapat terwujud apabila dijalankan dengan baik oleh institusi sosial. Hukum keseimbangan tidak ada pengecualian, tercantum pada Q.S. Al-Anbiya' ayat 47:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ.

Artinya: “Kami akan meletakkan timbangan (amal) yang tepat pada hari Kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun (amal itu) hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya. Cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.”

Prinsip keseimbangan telah dipertegas agar pengusaha Muslim dapat menyempurnakan takaran, karena perilaku yang baik akan membawakan dampak yang baik pula. Keseimbangan dalam Islam dimaknai sebagai upaya menjaga keadilan dan keharmonisan dalam seluruh aspek kehidupan dengan menempatkan segala sesuatu sesuai proporsinya serta menghindari sikap berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial.³⁵

c. Prinsip Kehendak Bebas (*Free Will*)

Islam mengakui kebebasan manusia dalam menentukan pilihan

³⁴ Syed Nawab Haider Naqvi., Op. Cit., 48-49.

³⁵ Ibid., 49-51.

hidup, tetapi kebebasan tersebut bersifat relatif, bukan mutlak. Sebagai *khalifah* manusia dapat memilih kebenaran dengan mengikuti syariat, namun juga berpotensi salah atau belum berhasil. Meski demikian, kesalahan menjadi ruang untuk belajar dan memperbaiki diri. Pada kegiatan bisnis manusia diberi kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, karena manusia itu bebas terhadap pilihan dan perbuatannya.

Salah satu kontribusi penting Islam dalam filsafat sosial adalah konsep tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kebebasan mutlak, sedangkan manusia diberikan kebebasan yang bersifat relatif sesuai dengan ketentuan penciptaan-Nya. Manusia memiliki kemampuan memilih, yang menunjukkan bahwa manusia tidak sepenuhnya terikat oleh takdir dalam arti pasif, melainkan diberi kesempatan untuk menentukan jalan hidupnya, baik mendekat kepada Allah maupun menjauhi-Nya. Kebebasan tersebut merupakan amanah yang telah diterima manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 72, ketika amanah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi manusia bersedia memikulkannya. Walaupun Allah Maha Mengetahui seluruh tindakan manusia, kebebasan memilih tetap menjadi karunia yang diberikan-Nya kepada manusia.

Sebagai makhluk yang diberi amanah dan kedudukan mulia di bumi, manusia memiliki hak untuk menggunakan kebebasannya dalam berbagai aspek kehidupan. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari fitrah manusia sehingga tidak boleh dirampas atau disalahgunakan oleh

kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi kebebasan manusia menjadi bagian dari tujuan ajaran Islam. Segala bentuk penindasan dan perampasan kebebasan dipandang sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial. Kebebasan dalam Islam berlaku bagi individu maupun masyarakat secara kolektif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.³⁶

d. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab berkaitan erat dengan status manusia sebagai khalifah di muka bumi dan harus dijalankan secara sukarela. Manusia memiliki kewajiban terhadap dirinya sendiri dan terhadap masyarakat. Jika terjadi ketidakadilan, tanggung jawab manusialah yang harus menjadi pendorong perubahan ke arah yang lebih adil, hal itu disampaikan dalam Q.S. Yunus ayat 108:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ
وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu kebenaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu. Maka, siapa yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya petunjuknya itu untuk (kebaikan) dirinya sendiri. Siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatannya itu (mencelakakan) dirinya sendiri. Aku bukanlah penanggung jawab kamu.”

Prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa setiap manusia

³⁶ Ibid., 51-53.

harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik kepada Allah Swt. maupun kepada sesama manusia. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Aktivitas ekonomi dan bisnis menuntut pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara jujur, amanah, serta tidak merugikan pihak lain, karena setiap tindakan yang dilakukan akan membawa konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan. Hal itu menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam Islam mendorong manusia untuk aktif menciptakan keadilan, menjaga keseimbangan sosial, serta melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.³⁷

3. Urgensi Etika Bisnis dalam Praktik Usaha

Urgensi penerapan etika bisnis Islam dalam praktik usaha di era modern ditandai dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan moral yang kuat untuk menciptakan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berintegritas, karena Islam sangat melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil, *gharar*, *maysir*, dan memicu keributan. Etika bisnis Islam memiliki urgensi substansial bagi pelaku usaha, sebagai berikut:³⁸

- a. Etika dapat menjadi pedoman islami dalam berbisnis dengan menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai syariah untuk melindungi

³⁷ Ibid., 54-56.

³⁸ Ambok Pangiuk., Op. Cit., 77.

pelaku usaha dari berbagai risiko.

- b. Sebagai landasan dalam penentuan tanggung jawab para pelaku bisnis, baik terhadap diri sendiri, pesaing usaha, masyarakat, maupun Allah SWT.
- c. Etika bisnis Islam dapat sebagai acuan normatif dalam menyelesaikan persoalan bisnis tanpa harus selalu membawa kepada pihak peradilan.
- d. Kode etik dapat membantu dalam menyelesaikan dan meredakan berbagai persoalan yang timbul antara pelaku usaha dan lingkungan sosialnya.
- e. Etika Bisnis Islam jika diimplementasikan dengan baik dapat memperkuat silaturahmi dan kerja sama yang kuat di antara semua pihak yang terlibat.

B. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

1. Pengertian *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*. Indonesia mengimplementasikan *SDGs* didasarkan pada empat pilar utama, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Keempat pilar ini menjadi kerangka kerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.³⁹

³⁹ Armida Salsiah Alisjahbana et. al., *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep*

2. Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Berikut Adapun 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sesuai Agenda 2030 yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*), menghapus kemiskinan dalam seluruh bentuk di berbagai tempat.
- b. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), menuntaskan masalah kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta memajukan sistem pertanian secara berkelanjutan.
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*), mengoptimalkan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap kelompok usia.
- d. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), menyediakan pendidikan yang adil, inklusif, dan merata, serta membuka peluang belajar sepanjang hayat bagi seluruh rakyat.
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*), mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*), memastikan ketersediaan air bersih dan layanan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*), menyediakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, serta modern bagi seluruh penduduk.

Target dan Strategi Implementasi, Cetakan 2 (Bandung: Unpad Press, 2018), 60-89.

⁴⁰ *Ibid.*, 61-63.

- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*), memperkuat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja produktif, dan menyediakan pekerjaan layak untuk seluruh masyarakat.
- i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*), mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap berbagai risiko, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memacu inovasi.
- j. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*), mengurangi ketimpangan baik di dalam suatu negara maupun antarnegara.
- k. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*), mewujudkan kota serta permukiman yang aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*), menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- m. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*), mengambil langkah cepat untuk menghadapi perubahan iklim dan segala dampaknya.
- n. Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan.
- o. Ekosistem Daratan (*Life on Land*), menjaga, memulihkan, dan memanfaatkan secara lestari ekosistem darat, mengelola hutan dengan bijak, menghentikan proses penggurunan, memulihkan lahan terdegradasi, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati.

- p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), memperkuat masyarakat yang damai serta inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menjamin akses terhadap keadilan, serta membangun institusi yang efektif, transparan, dan inklusif pada seluruh tingkatan.
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*), mengoptimalkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kolaborasi global guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tujuan-tujuan ini saling terkait dan dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Keempat pilar ini saling bergantung dan dirancang untuk menjaga keseimbangan antar-dimensi pembangunan. Pilar lingkungan sering ditempatkan sebagai fondasi karena keberlanjutan ekosistem menentukan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan perilaku sosial masyarakat. Keterkaitan tersebut menjadikan implementasi *SDGs* hanya dapat berhasil melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu agar tercipta pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut tabel *SDGs* pilar sosial:

Tabel 2.1
Pilar Sosial dalam *Sustainable Development Goals*

Pilar Sosial	Fokus Utama <i>SDGs</i>
<i>Goal 1. No Poverty</i> (Tanpa Kemiskinan)	Pengentasan kemiskinan dan penguatan kondisi ekonomi masyarakat.
<i>Goal 2. Zero Hunger</i> (Tanpa Kelaparan)	Ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.
<i>Goal 3. Good Health and Well-being</i> (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	Peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

<i>Goal 4. Quality Education</i> (Pendidikan Berkualitas)	Pendidikan inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
<i>Goal 5. Gender Equality</i> (Kesetaraan Gender)	Kesetaraan hak dan pemberdayaan perempuan.

Sumber: Data diolah peneliti (2025).⁴¹

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pilar sosial dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya lima tujuan utama, yaitu *Goal 1 No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), *Goal 2 Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan), *Goal 3 Good Health and Well-being* (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), *Goal 4 Quality Education* (Pendidikan Berkualitas), dan *Goal 5 Gender Equality* (Kesetaraan Gender). Fokus ini didasarkan pada relevansinya dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks aktivitas perdagangan di pasar tradisional, di mana:

- a. *Goal 1* berkaitan dengan pengentasan kemiskinan melalui keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan.
- b. *Goal 2* menekankan pemenuhan kebutuhan pangan dan distribusi bahan pokok.
- c. *Goal 3* menyoroti pentingnya kesehatan fisik dan batin melalui praktik kebersihan dan lingkungan yang sehat.
- d. *Goal 4* menegaskan pentingnya pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui jalur formal maupun pengalaman ekonomi.
- e. *Goal 5* menekankan kesetaraan gender dalam memberikan akses dan peluang yang adil bagi laki-laki dan perempuan.

⁴¹ Muhammad Miftahussurur and others, 'Handbook of SDGs Series UNAIR: Pilar Sosial' (Airlangga University Press, 2023), 1-77.

Terhadap kelima tujuan tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya melihat aspek ekonomi secara sempit, tetapi juga memahami keterkaitan antara nilai sosial, praktik usaha, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat secara lebih holistik.⁴²

C. Korelasi antara Etika Bisnis Islam dan Sustainable Development Goals

Etika Bisnis Islam dan *Sustainable Development Goals* memiliki keterkaitan yang mendalam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, serta kelestarian lingkungan. Perusahaan yang beretika akan berkontribusi dan berkomitmen dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.⁴³ Prinsip-prinsip Islam memiliki relevansi langsung dengan pencapaian target *SDGs*, seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*adl*), tanggung jawab sosial, transparansi, dan keberlanjutan (*istidāmah*) telah lama menjadi pedoman moral dalam praktik usaha.⁴⁴ Beberapa ajaran Islam memiliki relevansi langsung dengan pencapaian target *SDGs*, antara lain:⁴⁵

1. SDG 1 tentang penghapusan kemiskinan yang selaras dengan instrumen zakat, infak, dan sedekah.
2. SDG 8 mengenai penyediaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang adil sebagaimana dituntunkan dalam bisnis Islami.
3. SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang

⁴² Ibid., 12-88.

⁴³ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, Cetakan I (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 104.

⁴⁴ Calista Lutfi Candraningtyas, "Korelasi Antara Etika Bisnis Islam dengan *SDGs* dalam Implementasinya di Era Revolusi Society 5.0", 2024 <https://etikabisnisislam.blogspot.com/2024/12/korelasi-antara-etika-bisnis-islam.html>; diakses pada 27 September 2025, pukul 06.11 WIB.

⁴⁵ A.Pangeran Harahap, "Kolaborasi Etika Islam dan *SDGs*: Strategi Bisnis Berkeadilan", *Retizen*, 2024, <https://retizen.republika.co.id/posts/493398/kolaborasi-etika-islam-dan-SDGs-strategi-bisnis-berkeadilan>; diakses pada 27 September 2025 pukul 06.38 WIB.

sejalan dengan prinsip Islam dalam penggunaan sumber daya secara efisien.

4. SDG 13 mengenai penanganan perubahan iklim, yang ditegaskan melalui konsep manusia sebagai khalifah di bumi dengan kewajiban menjaga keseimbangan alam.